

ANALISIS PERAN DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK DALAM PENERAPAN SMART GOVERNANCE DI KABUPATEN BOMBANA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Rahmat Habib
NPP. 29.1041

*Asdaf Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: mattonk.habib@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *Public service as the main task of the government is currently in the public spotlight and has become an important part of the community itself. People have realized that public service is a right that they can demand and fight for. In order to fulfill these rights and demands, the government must strive to improve public services, namely by making policies related to the public in this case is smart governance.* **Purpose:** *The purpose of writing this research is to find out how the role of the Regional Government through the Information and Statistics Communication Service in running digital-based governance, namely smart governance in Bombana Regency, the supporting and inhibiting factors in program implementation, as well as the efforts made to overcome these obstacles.* **Method:** *This study uses a qualitative method with a descriptive approach. While the theory used is the theory of Levinson's role in analyzing the role of the Department of Communication, Informatics and Statistics in the application of smart governance. Data collection techniques using data triangulation techniques, namely observation, interviews and documentation.* **Result:** *The results of the study indicate that Bombana Regency in the implementation of technology-based public services, especially the smart governance program, can be said to have been running well but not yet optimal and there must be renewal. This is due to several problems in implementing the program, including not yet fully integrated public services, lack of network accessibility, and lack of public awareness.* **Conclusion:** *The role of the Department of Communication and Informatics has been good in several dimensions, while experiencing obstacles in the regulatory dimension, where there is no commitment in implementing regulations or rules. Factors supporting the implementation of the program, namely support from the community and the existence of applications that support smart governance. While the factors that become obstacles, namely the lack of public awareness of the importance of SPBE, and the commitment of the government itself in implementing the program.*

Keywords: *Role, Smart governance, Public Services, Bombana.*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): *Pelayanan publik sebagai tugas utama pemerintah saat ini semakin menjadi sorotan masyarakat dan telah menjadi bagian penting dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat telah menyadari bahwa pelayanan publik merupakan suatu hak yang dapat mereka tuntut dan mereka perjuangkan. Guna memenuhi hak dan tuntutan tersebut maka pemerintah harus berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik, yakni dengan membuat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pelayanan publik dalam hal ini adalah smart governance.* **Tujuan:** *Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam menjalankan pemerintahan berbasis digital yakni smart governance di Kabupaten Bombana,*

faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Peran Levinson dalam menganalisis peran Dinas Kominfo dalam penerapan *smart governance*. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik triangulasi data, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Bombana dalam pelaksanaan pelayanan publik berbasis teknologi khususnya program *smart governance* dapat dikatakan sudah berjalan baik namun belum optimal dan harus adanya pembaharuan. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya belum terintegrasi sepenuhnya pelayanan publik, kurangnya aksesibilitas jaringan, serta kesadaran masyarakat masih kurang. **Kesimpulan:** Peran Dinas Kominfo telah baik pada beberapa dimensi, sedangkan mengalami hambatan pada dimensi aturan, dimana komitmen dalam menjalankan regulasi atau aturan belum ada. Faktor pendukung pelaksanaan program, yaitu dukungan dari masyarakat dan adanya aplikasi pendukung *smart governance*. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SPBE, dan dari komitmen pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan program.

Kata kunci: Peran, *Smart governance*, Pelayanan Publik, Bombana.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan digital (*e-government*) dalam Bahasa Indonesia juga dikenal dengan istilah SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pelayanan atau sebuah pembenahan sistem manajemen dan proses kerja dilingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), pelaksanaan kebijakan SPBE sudah menjadi kebijakan pusat pada tahun 2018 yang mengharuskan daerah untuk menyiapkan infrastruktur dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan SPBE. Hal tersebut untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kepada masyarakat Bombana yang jumlahnya cukup banyak, sehingga memerlukan pelayanan yang dapat dengan mudah diakses.

Di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat beberapa kabupaten/kota yang menerapkan *smart government* salah satunya adalah Kabupaten Bombana. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara No. 02 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Smart governance* atau tata pemerintahan yang pintar adalah sebuah konsep dan praktik tentang bagaimana melakukan pengelolaan dan manajemen pemerintahan dan pelayanan publik secara lebih cepat, efisien, efektif dan responsif, serta terus meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang komprehensif. Konsep *smart governance* harus diterapkan dan diukur dalam tiga sub dimensi, yaitu : pelayanan publik (*service*), birokrasi (*birokrasi*), dan kebijakan publik (*policy*).

Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik dalam pelaksanaan *smart governance* telah mengacu pada Peraturan Bupati Bombana No. 39 Tahun 2016 Tentang Tugas dan Fungsi Bagian Keempat Tentang Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam proses implementasinya, *smart governance* di Kabupaten Bombana dalam hal teknologi pendukung *e-government* sudah berjalan baik. Tantangan utama terletak pada regulasi dan kesiapan infrastruktur yang ada, yaitu kurangnya aksesibilitas jaringan terutama di daerah pedesaan dan daerah yang memiliki kualitas jaringan yang buruk. Kesadaran masyarakat yang minim atas pentingnya *smart governance* juga menjadi salah satu penghambat khususnya pada target pencapaian keberhasilan *smart governance*.

Untuk menghasilkan masyarakat yang berkompeten, berdaya saing tinggi, serta sebuah tatanan pemerintahan yang cerdas, hal tersebut juga berkaitan dengan Pemerintah Daerah yang harus menetapkan sebuah kebijakan yang cepat dan akurat dengan mempersiapkan konsep yang nantinya akan berpengaruh pada penataan dan pembangunan sistem pemerintahan untuk masa depan yang berkualitas. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik berupaya menjalankan perannya sebagai pelaksana pelayanan publik, fasilitator, inovator, maupun panutan bagi daerah lain.

Peran tersebut dijalankan sebagai upaya dalam menerapkan *smart governance* untuk memajukan sarana dan prasarana, meningkatkan produktivitas manusia yang hidup di dalamnya. Sehingga menghasilkan kabupaten dengan penataan baik dan pengelolaan sumber daya tepat guna dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau *digital* secara menyeluruh di semua bidang aspek kehidupan.

Dengan adanya fenomena di atas, maka penulis merasa perlu mengetahui bagaimana peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam menerapkan konsep *smart governance* di Kabupaten Bombana yang akan dijelaskan dalam skripsi yang berjudul **Analisis Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam Penerapan *Smart governance* di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara**.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Smart governance merupakan suatu konsep tata pemerintahan yang cerdas dengan berbasis ICT dipadukan dengan kecanggihan dari masyarakatnya yang paham akan teknologi sehingga menghasilkan suatu tatanan pemerintahan lokal yang dirancang berbagai macam rupa untuk kepentingan masyarakat, terkait dengan pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien.

Dalam rangka mensukseskan itu semua perlu ada peran dari pemerintah yang ikut berpartisipasi dalam langkah menuju suksesnya dalam tata kelola pemerintahan. Hal itu menjadi dasar sebuah peran dalam mengaplikasikan sebuah sistem pemerintahan dengan menggunakan konsep teknologi di era saat ini. *E-Governance* sebagai stimulant yang dapat memperbaiki dan dapat menjadi sebuah solusi.

Dengan demikian penerapan dari program *smart governance* sudah menjadi sebuah tuntutan bagi pemerintah daerah dengan tujuan utamanya adalah meningkatkan suatu penataan pemerintahan dan pelayanan publik menuju ke arah yang lebih baik. Maka dapat dipercaya *smart governance* dapat memberikan sebuah solusi yang inovatif yang sifatnya dapat membangun dan menata bagi praktek penyelenggaraan pemerintah lokal. Dari itu semua dapat dihasilkan sebuah kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan pemerintah lebih akuntabel.

1.3. Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan tema pemerintahan digital, telah banyak dilakukan penulisan sebelumnya seperti halnya oleh Fifi Febrianti dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dengan judul *Smart governance : Aplikasi Simpel (Sistem Informasi Dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik) Dalam Pelayanan Publik Di Kabupaten Bone*, yang membahas pelaksanaan *smart governance* melalui aplikasi SIMPEL Bone dalam akses pelayanan publiknya memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat Bone.

Kemudian oleh Irfan dari Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2018 dengan judul *Pelaksanaan Smart governance di Kabupaten Soppeng*. Namun demikian dia menyoroti aspek keterlibatan masyarakat dalam mengakses internet dalam upaya pelaksanaan *smart governance*.

Penulisan sebelumnya terkait pemerintahan digital juga dilakukan oleh Dinda Mahdanisa dan Nurlim dari BALITBANGDA Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2018 dengan judul *Analisis Penerapan E-government Dalam Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo)*

Kabupaten Kutai Kartanegara yang membahas pelayanan E-government melalui aplikasi oleh kementerian yaitu SiMAYA dapat meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat.

Penulisan lainnya terkait pemerintahan digital yang dilakukan oleh Aulia Shabrinawati dan Nany Yuliasuti dari Universitas Diponegoro pada tahun 2020 dengan judul Implementasi *Smart governance* Berdasarkan Konsep *Smart Village* yang menyoroti dari implementasi komponen *smart governance* yakni penerapan konsep smart village di Kabupaten Batang.

Penulisan lainnya terkait tema pemerintahan digital oleh Restu Ramadhan, Ria Arifianti, Riswanda dari Universitas Padjadjaran pada tahun 2019 dengan judul Implementasi *E-Government* Di Kota Tangerang Menjadi *Smart City* (Studi Kasus Aplikasi Tangerang Live) yang lebih menyoroti pada aspek kebijakan smart city berbasis aplikasi Pemerintah Kota Tangerang, yaitu aplikasi Tangerang live untuk mempercepat pelayanan publik tetapi dalam hal implementasi program smart city.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, yaitu menyoroti bagaimana tindakan yang dilakukan pemerintah dalam menerapkan pelayanan publik berbasis digital, dimana terdapat peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam menerapkan *smart governance*. Selain itu teori yang digunakan juga berbeda dari penelitian sebelumnya yakni menggunakan Teori Peran Levinson yang menyatakan bahwa peran menganut tiga dimensi pokok yaitu aturan, tindakan organisasi dan perilaku individu.

1.5 Tujuan.

Sedangkan penelitian yang dibuat penulis bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam penerapan *smart governance*, menganalisis apa saja faktor penunjang dan penghambat dalam penerapan *smart governance*, serta mengetahui dan menganalisis apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penerapan *smart governance* di Kabupaten Bombana.

II. METODE

Dalam melaksanakan penulisan ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif karena sumber data maupun hasil penulisan ini berupa kata-kata yang menggambarkan atau menguraikan sesuatu hal yang apa adanya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan analisis induktif. Analisis induktif dimulai dari fakta di lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan, kemudian dihubungkan dengan teori, dalil atau hukum yang sesuai pernyataan hingga disimpulkan. Melalui desain penelitian ini, penulis memberi gambaran tentang bagaimana peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dalam upaya menerapkan smart governance di Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara.

Penulis mengumpulkan data melalui metode triangulasi data, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam wawancara pemilihan informan menggunakan metode purposive sampling yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu pada informan yang benar-benar menguasai suatu objek yang diteliti, dimana terpilih lima orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik, Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi TIK, dan empat orang masyarakat setempat.

Data ataupun informasi yang didapatkan dilakukan validasi data menggunakan teknik triangulasi, kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman (1984) yang meliputi aktivitas reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan upaya pelaksanaan smart governance di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, maka penulis melakukan analisis berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan terkait upaya pelaksanaan smart governance di Kabupaten Bombana. Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu teori Peran Levinson terdapat tiga dimensi; dimensi norma/aturan, tindakan organisasi, dan perilaku.

3.1. Peran Meliputi Norma/ Aturan

Menurut Teori Peran norma yang dikemukakan oleh Levinson, peran dapat dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan merupakan sebuah rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan ini norma juga dapat diartikan sebagai sebuah pedoman dalam menjalani sebuah kegiatan atau aktivitas. Norma juga berfungsi untuk mengatur kegiatan individu atau kelompok agar tidak melampaui batas. Jika individu atau kelompok didapati melanggar aturan yang berlaku maka akan diberikan sanksi atau hukuman sesuai dengan apa yang telah diperbuat.

Pemerintah Kabupaten Bombana dalam menjalankan program *smart governance* telah berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Jadi, dalam melakukan peran pelaksanaan smart governance, harus memperhatikan aturan yang berlaku. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis, maka dapat dikatakan bahwa program dijalankan berlandaskan regulasi yang ada dengan mengacu pada Peraturan Daerah Sulawesi Tenggara. Akan tetapi, dalam menjalankan aturan tersebut terdapat hambatan yaitu dari dimensi norma atau aturan, dimana belum adanya aturan khusus yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan smart governance di Kabupaten Bombana. Sehingga, pemerintah harus menetapkan sebuah regulasi yang akan dijalankan untuk membimbing dalam pelaksanaan smart governance agar sesuai dengan arah kebijakan pemerintah, serta terciptanya sebuah hubungan dan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

3.2. Peran Sebagai Suatu Tindakan

Peranan sebagai tindakan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Mengenai hal tersebut peran Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik memiliki suatu konsep untuk dikembangkan di lingkungan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik agar lebih mudah di akses oleh masyarakat.

3.2.1. Pelayanan publik

Pelayanan publik yang dimaksudkan adalah berbasis teknologi. Karena kemajuan teknologi harus didukung dengan kemampuan masyarakatnya agar terciptanya keselarasan untuk mencapai tujuan bersama. Dengan menggunakan sistem berbasis teknologi ini harus adanya skill atau kemampuan dari setiap individu untuk paham dalam mengoperasikan guna mendukung program smart governance.

Berdasarkan pernyataan dari beberapa narasumber maka pemerintah Kabupaten Bombana melalui Dinas Kominfo telah berperan sebagai pelaksana pelayanan publik. Jadi, untuk memaksimalkan pelayanan tersebut maka pemerintah memanfaatkan program smart governance untuk lebih memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kabupaten Bombana telah berusaha memberikan informasi kepada masyarakat melalui Sosialisasi media elektronik dan media cetak. Sehingga, dalam situasi pandemi terus melakukan sosialisasi dengan sistem daring. Hal ini dilakukan agar masyarakat lebih mengenal pelayanan publik berbasis teknologi.

3.2.2. Fasilitator

Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana memberikan fasilitas untuk menunjang pelaksanaan smart governance, tujuannya tidak lain adalah untuk mempermudah pemerintah dan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis teknologi.

Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana yang berperan sebagai fasilitator sudah cukup efektif dikarenakan telah melakukan fasilitasi terhadap pegawai atau aparatur juga masyarakat melalui beberapa pelatihan dan diklat juga berperan aktif dalam membangun jaringan internet di beberapa dinas atau organisasi perangkat daerah (OPD).

3.2.3. Inovator

Menjalankan peran selaku inovator, pemerintah sebagai keseluruhan harus menjadi sumber dari hal-hal baru. Jadi prakondisi yang harus terpenuhi agar efektif memainkan peranannya pemerintah perlu memiliki tingkat keabsahan (*legitimacy*) yang tinggi. Suatu pemerintahan yang tingkat keabsahannya rendah akan sulit menyodorkan inovasinya kepada masyarakat. Tiga hal yang mutlak mendapatkan perhatian serius adalah, penerapan inovasi dilakukan dilingkungan birokrasi terlebih dahulu, inovasi yang sifatnya konsepsional, inovasi sistem, prosedur dan metode kerja.

Dapat diketahui bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik telah menerapkan inovasi untuk menjalankan *smart governance*, yaitu Bombana Smart Regency untuk meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Bombana. Meskipun dalam pencapaian targeten masih kurang, tetapi telah memberikan dampak yang baik bagi masyarakat, khususnya dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3.3. Peran Sebagai Perilaku

Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk nyata interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi, akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya dapat juga ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang berbeda. Peran sebagai perilaku yaitu berupa tanggung jawab dalam menjalankan program *smart governance*, dimana pemerintah harus menjadi panutan bagi masyarakat maupun daerah lain. Tanggung jawab dalam bentuk hal-hal positif seperti dalam bekerja seproduktif mungkin, dalam menegakkan keadilan dan kedisiplinan, dalam kepedulian terhadap lingkungan, budaya dan sosial, dan dalam berkorban demi kepentingan negara.

Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik sudah menjalankan perannya sebagai perilaku yakni adanya tanggung jawab dalam menjalankan program, dalam hal yang baik dan positif. Jadi, perilaku tanggung jawab tersebut telah menjadi percontohan kepada masyarakat. Disamping itu program *smart governance* mengikuti perkembangan zaman digital dimana segala aktivitas sudah menggunakan berbasis teknologi, merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Bombana untuk menjadi percontohan bagi daerah lain.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam menjalankan program dikategorikan belum berjalan baik dan harus adanya pembaharuan, dikarenakan beberapa permasalahan yang menjadi fenomena dalam pelaksanaan program tersebut, diantaranya belum terintegrasi sepenuhnya pelayanan publik, kurangnya aksesibilitas jaringan, kesadaran masyarakat masih kurang, dan aparatur pelaksana yang minim. Fenomena tersebut berkaitan dengan faktor penghambat dalam pelaksanaan program. Dimana beberapa faktor penghambat dalam memberikan pelayanan *smart governance* kepada masyarakat hal yang menjadi kendala terdapat dari masing-masing individu atau kelompok, yakni kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan berbasis teknologi, serta komitmen pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan program dan melakukan pembangunan, baik dari segi perencanaan (*master-plan*), maupun persiapan yang matang.

Kemudian dari ketiga dimensi peran yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa dimensi norma atau aturan menjadi faktor hambatan utama dalam penerapan program. Dimana jika dilihat dari dimensi aturan, maka komitmen dalam menjalankan regulasi atau aturan belum tercapai sebab

pelaksanaannya masih mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi, dan belum didukung dengan adanya dasar hukum dalam bentuk Perda Kabupaten Bombana, serta belum ada perencanaan induk (*master plan*) dalam pelaksanaan *smart governance* di Kabupaten Bombana.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Pelaksanaan program tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor penghambat sehingga dapat membuat tidak berjalannya suatu pelayanan dengan baik. Oleh karena itu adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan, diantaranya sosialisasi sangat perlu dilakukan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya program berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan pemerintah daerah dalam menyesuaikan aturan terkait program *smart governance* melakukan penyesuaian kebijakan dengan membuat rencana induk.

IV. KESIMPULAN

Peran Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana dalam menjalankan program dikategorikan belum berjalan baik dan harus adanya pembaharuan. Hal tersebut dapat terlihat dimana terdapat dimensi yang menjadi faktor hambatan utama dalam penerapan program yaitu pada dimensi aturan. Dilihat dari dimensi aturan, maka komitmen dalam menjalankan regulasi atau aturan belum ada, karena masih mengacu pada Perda Provinsi Sulawesi Tenggara No. 2 Tahun 2020, dan belum didukung dengan adanya dasar hukum dalam bentuk Perda Kabupaten Bombana, serta belum ada perencanaan (*master plan*) dalam pelaksanaan *smart governance* di Kabupaten Bombana. Sehingga pemerintah harus berupaya dalam menjalankan komitmen tersebut dalam hal ini menetapkan regulasi dan perencanaan (*master plan*). Jadi jika sudah ada *master plan* maka Pemda akan lebih fokus dalam mengembangkan program tersebut.

Faktor pendukung pelaksanaan program *smart governance* di Kabupaten Bombana yakni dukungan dari masyarakat dan adanya aplikasi pendukung *smart governance*. Sedangkan faktor yang menjadi hambatan, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya SPBE, dan dari komitmen pemerintah itu sendiri dalam melaksanakan program. Komitmen tersebut dapat terlihat dari belum adanya aturan pelaksanaan program, baik dari segi perencanaan (*master-plan*), maupun persiapan yang matang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian yang singkat sekitar 2 (dua) minggu. Penelitian juga hanya dilakukan pada saat pandemi sehingga kurang optimal dalam melaksanakan kegiatan penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait pelaksanaan pemerintahan berbasis digital atau SPBE, seperti *smart governance* maupun aspek *smart city* lainnya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Putra Grafika, 2007.
- Fauziana, Sartika Putri. "Kepemimpinan Efektif Kepala Sekolah Di Taman Kanak-Kanak Assalam 1 Sukarame Bandar Lampung." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.
- Indrajit, Richardus Eko. *Electronic Government (Strategi Pembangunan Dan*

Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital.
Yogyakarta: Andi, 2004.

- Mahdanisa, Dinda, and Nurlim. "Analisis Penerapan E-Government Dalam Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas KOMINFO) Kabupaten Kutai Kartanegara" 12, no. 25 (2018): 50–60.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Edited by Risman Sikumbang. Bogor: Ghalia Indonesia, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Ed. Baru 4. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suaedi, Falih Dan Wardiyanto, Bintoro. *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi Dan E-Governance)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif , Kualitatif Dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Tampubolon, L.P. "Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI) Dan Pemanfaatan Teknologi Informais Di DKI Jakarta." *Jurnal Sistem Informasi (JSI)* Vol. 8, No (2016).
- UGM, P. *Road Map Kota Yogyakarta Menuju Smart City. Working Paper PSPPR*, 2016.
- Heeryl. "Inovasi Anyar Bupati Tafdil, Bombana Smart Regency." Last modified 2021. <https://kendaripos.co.id/2021/03/inovasi-anyar-bupati-tafdil-bombana-smart-regency/>.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Peraturan Bupati Bombana Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Bombana
- <https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2020/07/20/governance-vs-government-vs-smart-governance-vs-smart-government/>
- <https://bombanakab.go.id/>
- <http://smartregency.bombanakab.go.id/>
- <https://egovernmentindonesia.wordpress.com/2020/07/20/governance-vs-government-vs-smart-governance-vs-smart-government/>